

**Sekolah Politik Perempuan Nasyiatul Aisyiyah Sebagai
Pendidikan Politik Perempuan**

(Studi Kasus PWNA DIY Tahun Periode 2012-2016)

Oleh:

Candra Adi Doyo dan Nur Hidayah, M.Si.

E-mail: candidoy19@gmail.com

Pendidikan Sosiologi – Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mencari tahu bagaimana proses pelaksanaan dan kendala-kendala dalam Sekolah Politik Perempuan. Untuk mendapatkan data, penelitian mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur, studi dokumen arsip dan foto; melibatkan informan berjumlah 8 orang, terdiri dari penyelenggara dan peserta; divalidasi dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik; dan dianalisis mengikuti teknik interaktif – pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan – Milles dan Huberman. Hasil penelitian bahwa latar belakang Nasyiatul Aisyiyah melakukan pendidikan politik adalah karena keikutsertaan dalam Kelas Parlemen, menyikapi masalah-masalah politik; penyimpangan politik, rendahnya partisipasi politik perempuan, dan indikasi ketertarikan kader terjun ke politik. Sekolah Politik Perempuan sebagai pendidikan politik perempuan oleh Nasyiatul Aisyiyah, selain membahas tentang politik juga memuat nilai-nilai agama dan isu-isu perempuan. Fungsi laten kegiatan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan mendapatkan kekuasaan. Kendala yang dihadapi penyelenggara adalah konsistensi peserta dalam mengikuti setiap pertemuan, hal ini membuat penyelenggara kesulitan menilai hasil pendidikan politik.

Kata kunci : Pendidikan Politik, Perempuan.

Women's Political School of Nasyiatul Aisyiyah As a Political Education For Women's (Case Study of PWNA DIY Year Period 2012-2016)

Written by:

Candra Adi Doyo and Nur Hidayah, M.Si

E-mail: candidoy19@gmail.com

Sociology Education – Social Science Faculty – Yogyakarta State University

ABSTRACT

This research aimed to find out how the implementation process and the constraints in the Women's Political School. To obtain data, the research used a qualitative approach with semi-structured interview method, document archives and photos. This research involved eight informants which consist of the organizers and the participants of the Women's Political School. This research was validated by using triangulation of sources and technique triangulation, and was analyzed by using interactive techniques - data collection, data reduction, data presentation and conclusion - Milles and Huberman. The result of this research stated that the background of Nasyiatul Aisyiyah doing political education are due to participation in "Kelas Parlemen", political issues, and an indication of the interest of cadres in politics., Women Politics School as a political education of women by Nasyiatul Aisyiyah, beside discussing about politics, it also contains religious values and women's issues. The latent functions of this activity are to gain economic benefits and to gain the power. The constraints faced by the organizers is the consistency of participants in following each meeting, this makes the organizers difficult to assess the result of political education.

Keywords: Political Education, Women.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bermaksud mengetahui proses pendidikan politik dan kendala-kendala yang dihadapi Nasyiatul Aisyiyah dalam menyelenggarakan Sekolah Politik Perempuan. Sebelum mengetahui alasan proses dan kendala-kendala dalam Sekolah Politik Perempuan, dalam penelitian ini juga bermaksud mengetahui latar belakang Nasyiatul Aisyiyah dalam melaksanakan pendidikan politik.

Politik dapat dianalogikan sebagai instrumen dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Politik menurut Budiardjo (2008: 13-14) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*). Kondisi politik nasional saat ini terbilang buruk dan memprihatinkan, politik disalahgunakan oleh para oknum politisi. Korupsi, penyuapan, *money politics* hanyalah sebagian dari sekian banyaknya praktik

penyimpangan politik yang dilakukan para oknum politisi. Berbagai bentuk praktik penyimpangan politik tersebut seakan mengaburkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam fungsi politik itu sendiri, bahwa lewat politik kita bisa mewujudkan kemakmuran rakyat.

Reformasi membawa Indonesia menuju era demokrasi, suatu era dimana semua elemen diberikan hak untuk berpendapat, berkesempatan, dan berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk kepada perempuan. Menurut Susanti dalam Konstitusi (2008: 57) pemahaman politik perempuan harus lebih dikembangkan ke arah meningkatkan kepedulian perempuan dari semua lapisan masyarakat terhadap masalah ketidakadilan, otonomi daerah dan permasalahan makro lainnya pada tingkat negara. Sehingga keberadaan perempuan bisa memberi sumbangan yang signifikan bagi pengambilan kebijakan yang ramah perempuan dan peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia. Menilik

pelaksanaannya di Indonesia, hal tersebut tampaknya bisa dibayangkan jauh panggang dari api.

Kebijakan afirmatif atau kuota perempuan yang mulai diberlakukan pada pemilu 2004 telah membuka gerbang kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik. Mulai dari kepengurusan partai politik hingga calon legislatif perempuan diberikan kuota minimal 30% dari total keseluruhan. Berdasarkan data dari Susiana dalam Jurnal P3DI (2014:10) peningkatan keterwakilan perempuan sejak kebijakan kuota diterapkan, partisipasi politik perempuan di parlemen yang masih jauh dari kuota 30%. Pada pemilu 1999, total anggota DPR 500 dengan jumlah perempuan sebanyak 45 orang (9%). Pemilu 2004, total anggota DPR 550 dengan jumlah perempuan sebanyak 61 orang (11,09%). Sedangkan dalam pemilu 2009, total anggota DPR 560 dengan jumlah perempuan sebanyak 101 orang (17,86%).

Menurut Wuriyanto (dalam Sastriyani, 2009: 67) pendidikan politik bagi kaum perempuan adalah

memperoleh seperangkat proses pendewasaan hidup bagi perempuan, pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam publik. Perempuan harus diberi pemahaman bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam politik sehingga tidak ada alasan untuk tabu terlibat dalam politik. Setelah memiliki pemahaman kesetaraan maka bekal pemahaman tentang politik. Pemahaman tentang politik dibutuhkan agar ketika perempuan diberi kesempatan dapat benar-benar menjadi kekuatan tersendiri dan tidak hanya sebagai “pemanis”. Dengan demikian, maka keterlibatan perempuan dapat menjadi lebih terasa dan bermakna sebagai bentuk afirmasi terhadap kepentingan golongan perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian Amirullah (2016: 18-22), diketahui bahwa Bentuk-bentuk pendidikan politik dalam Partai Golkar, PPP, dan PKS berupa pelatihan-pelatihan dan training. Partai Golkar, PPP maupun PKS sangat jarang melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan konstituen perempuan. Kendala-

kendala yang dialami oleh ketiga partai tersebut adalah dalam hal pendanaan dan rendahnya minat kader perempuan untuk terlibat dalam politik.

Peran memberikan pendidikan politik pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan partai politik, namun hal ini juga dapat dilakukan organisasi massa mengingat jangkauan massanya yang lebih luas dan posisinya yang dianggap netral (Susanti, 2008:64).

Ditengah kondisi dan permasalahan-permasalahan politik di atas, Pimpinan Wilayah Nasyyiatul Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pendidikan politik yang diberi nama Sekolah Politik Perempuan. Sekolah Politik Perempuan adalah program kerja departemen sosial dan pendidikan Pimpinan Wilayah Nasyyiatul Aisyiyah DIY periode 2012-2016. Sekolah Politik Perempuan mulai dilaksanakan pada tahun 2013. Sekolah Politik perempuan dilaksanakan secara berkeliling ke 5 kabupaten/kota di DIY, serta melibatkan kepala daerah setempat

sebagai narasumbernya. Namun dalam perjalannya, Sekolah Politik Perempuan tidak berjalan tepat sesuai rencana dan akhirnya terhenti pada pertemuan ke 7.

Dalam mengupas bagaimana proses pendidikan dan kendala-kendala dalam Sekolah Politik Perempuan. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan pilihan rasional, yaitu tentang motif tindakan dan tujuan pendidikan politik yang dilakukan Nasyyiatul Aisyiyah. Untuk menguraikan proses pendidikan politik dalam Sekolah Politik Perempuan, peneliti merujuk pada proses pendidikan Lopera (dalam Mahardika, 2001: 106-107) yang memiliki unsur pemberdayaan dan strategi advokasi gerakan perempuan dengan melibatkan tokoh-tokoh agama yang memiliki otoritas ilmu keagamaan yang memahami wacana keadilan gender (Fakih, 2013: 140). Sedangkan untuk menganalisa kendala-kendala dalam Sekolah Politik Perempuan, peneliti membandingkannya dengan pendidikan politik perempuan yang dilaksanakan partai politik serta

kecenderungan gerakan perempuan dalam beraktivitas dalam isu-isu strategis atau politik.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Kartono (2009: 67-68) pendidikan politik itu merupakan proses mempengaruhi individu agar dia memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan lebih jernih, dan ketrampilan politik yang lebih tinggi; sehingga dia bisa bersikap kritis dan lebih intensional/terarah hidupnya. Juga diharapkan menjadi warganegara yang cerdas mantap, sebab tidak terapung-apung melayang tanpa bobot pengertian dan kesadaran dan tanpa arah di tengah kancah politik.

Menurut Kartono (2009: 86) pendidikan politik memiliki tujuan pokok meliputi partisipasi politik rakyat dan keikutsertaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum. Jadi, pendidikan politik ialah upaya untuk menyiapkan pribadi-pribadi dalam perjuangan politik. Menurut Surbakti (2010: 180-181) partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik merupakan bentuk tingkah laku baik menyangkut aspek sosial maupun politik. Tindakan-tindakan dan aktivitas politik tidak hanya menyangkut hal-hal apa yang mendorong individu berpartisipasi. Hal itu penting, karena tindakan-tindakan politik memiliki kaitan dengan partisipasi politik itu sendiri. Weber mengemukakan empat motif, yaitu motif rasional-bernilai, motif afektual-emosional, motif tradisional, motif rasional-bertujuan.

Menurut Sastroatmodjo (1992: 80) partisipasi politik tidak bisa dipisahkan dari kegiatan mencari koneksi. Mencari koneksi merupakan suatu tindakan yang berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan pejabat-pejabat pemerintah. Umumnya mencari koneksi di dalam jajaran pejabat pemerintah, biasanya urusan-urusan menjadi lebih mudah dan kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi dapat diperoleh.

Pendidikan politik diawali dengan kegiatan mendapatkan banyak informasi politik sebagai pengoperan pengetahuan (transmisi ilmu) itu mendapatkan *perspektif kemasyarakatan*; yaitu untuk kepentingan orang banyak dan rakyat. Kemudian dilanjutkan dengan *aksi/ perbuatan politik secara nyata*. Maka ada kesinambungan antara ide (konsep, penalaran) dengan realita politik (perbuatan politik secara konkret) (Kartono, 2009: 83).

Model pendidikan tersebut memuat proses pendidikan pemberdayaan. Pendidikan pemberdayaan pada dasarnya adalah membawa peserta pendidikan untuk bisa membongkar realitas yang hadir dihadapannya, memiliki kesadaran kritis, sehingga meskipun secara faktual ia tidak mampu mengatasi ketidakadilan, akan tetapi setidaknya peserta pendidikan dapat mengerti mengapa dan bagaimana kenyataan tersebut berlangsung, dan secara “sistematik” mengusahakan langkah-langkah guna mengatasi persoalan tersebut. Pada intinya, pendidikan

pemberdayaan tidak menjadi jalan bagi manipulasi, melainkan sebagai bagian dari proses emansipasi kesadaran manusia Menurut Mahardika (2001: 63).

Selama ini, secara umum, perempuan, sebagaimana masyarakat umum selalu menjadi objek politik. Mereka hanya dilirik untuk hitungan suara saja. Hal ini tentu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan politik itu sendiri selama ini, yakni pencerdasan politik (Soeharto, 2011: 328). Perempuan saat ini mempunyai peluang yang cukup signifikan dalam kegiatan politik. Dengan pendidikan politik yang baik, diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi kaum perempuan untuk menggunakan hak pilihnya (Soeharto, 2011: 332).

Pendidikan politik bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan kaum perempuan, yang memiliki kekuatan penyadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan terhadap marginalisasi

politik terhadap kaumnya (Soeharto, 2011: 326).

Berubahnya undang-undang, hak ekonomi serta akses terhadap berbagai aspek bagi kaum perempuan tidak secara fundamental merubah posisi mereka. Semakin terbukanya kesempatan kaum perempuan untuk memasuki berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan, ternyata juga tidak serta-merta merubah posisi perempuan di masyarakat (Fakih, 2013: 108).

Maka sebaiknya para aktivis menempuh beberapa strategi diantaranya: menciptakan kesempatan agar kaum perempuan akar rumput (*grassroots*) memiliki organisasi. Adanya organisasi tersebut memungkinkan terjadinya suatu proses yang melahirkan kesadaran kritis kaum perempuan. Gerakan feminisme harus memperkuat barisan, menciptakan ruang agar perempuan memiliki kualitas (Fakih, 2013: 117).

Ormas keagamaan sebagai lembaga nonpemerintah diharapkan dapat menempati posisi sebagai

institusi yang di samping menjadi kekuatan penyeimbang, juga memiliki kemampuan untuk melakukan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat, membangun kekuatan politik, ekonomi sosial dan budaya (Hidayat, 2008: 8). Ketika kondisi politik nasional tidak seperti seharusnya maka dibutuhkan kekuatan penyeimbang yang mampu mengisi kekosongan peran-peran yang tidak terlaksana, diantaranya dalam upaya pendidikan politik. Dalam hal ini, pendidikan politik juga dapat dilakukan organisasi massa, mengingat jangkauan massanya yang lebih luas dan posisinya yang dianggap netral (Susanti, 2008: 64).

Organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan menempati posisi yang khas dibandingkan dengan organisasi umumnya, *pertama* bahwa secara khusus ormas keagamaan dibentuk bukan untuk mencari keuntungan apalagi yang bersifat material finansial, *kedua* bahwa organisasi sosial keagamaan berada di luar wilayah organisasi pemerintah,

ketiga bahwa dalam kegiatannya ia lebih memusatkan sasarannya pada kepentingan anggota (masyarakat) serta *keempat* keanggotaannya bersifat massif (Efzioni dalam Hidayat, 2008: 9).

Organisasi perempuan terjerat pada situasi sulit, di mana mereka juga berada dalam bingkai ekonomi dan kondisi politik liberal. Mereka sadar bahwa mereka adalah *instrument*, sebagai *civil society*, tanpa kesempatan besar untuk mengaktualisasikan posisi politik *civil society* dalam proses perumusan kebijakan, melainkan hanya disibukkan dengan manajemen pada level mikro (Soetjipto, 2011: 30).

Mayoritas organisasi perempuan bekerja di isu nonpolitik dan nonkebijakan dengan tujuan pemberdayaan perempuan yang bekerja di isu strategis sangat minim jumlahnya dan sulit didapati di level yang paling bawah tingkatan kabupaten/kota (Soetjipto, 2011: 67).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran proses pendidikan politik yang dilakukan Nasyiatul Aisyiyah melalui Sekolah Politik Perempuan. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menguraikan kendala-kendala yang dihadapi penyelenggara dan peserta dalam pelaksanaan Sekolah Politik Perempuan. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengambilan data dengan cara melakukan wawancara dan melakukan studi dokumentasi.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan selama 2 bulan, mulai April hingga Mei 2017. Kantor PWNA DIY berada di Komplek PWM DIY di Jl. Gedong Kuning No.103 B, Rejowinangun Kotagede. Namun penelitian ini dilakukan di kantor PPNA di Jl KHA Ahmad Dahlan No.103 Ngampilan, Kota Jogja, karena pengurus PWNA DIY lebih sering berkegiatan di tempat tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara dengan peserta Sekolah Politik Perempuan di

Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman.

Target/Subyek Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Peneliti bermaksud mendapatkan data dari 2 kategori informan, yaitu penyelenggara dan peserta Sekolah Politik Perempuan. Dalam memilih informan, peneliti memilih informan kunci yang memberikan arahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. Peneliti mewawancarai 8 orang, 3 penyelenggara dan 5 peserta Sekolah Politik Perempuan dari Kulon Progo, Sleman, dan Bantul.

Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan data

Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui pertemuan langsung dengan informan. Sumber data sekunder peneliti peroleh dari data seperti dokumen, studi kepustakaan baik

dari media cetak ataupun media internet dsb.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, handphone sebagai perekam suara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, yaitu wawancara semi terstruktur. Dokumentasi yang didapatkan peneliti yaitu naskah sambutan bupati, daftar hadir, dan foto-foto pelaksanaan Sekolah Politik Perempuan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan merujuk pada Miles and Huberman (1984) yaitu (1) Reduksi data. Berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. (2) *Data display* (penyajian data) atau mendisplaykan data. (3) *Condlusion Drawing* atau yang dikenal dengan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa latar belakang yang

mendorong NA melaksanakan Sekolah Politik Perempuan

(1) Kelas Parlemen

Keikutsertaan FW dan KHH dalam Kelas Parlemen telah menginspirasi mereka untuk mengadakan SPP. Pendidikan politik yang didapatkan melalui Kelas Parlemen telah membuka kesadaran kritis dan wawasan politik. Pemahaman politik telah membuat pesertanya kritis dan peka terhadap realita di lingkungannya, sehingga mereka tergerak untuk melakukan perubahan dengan melakukan pendidikan politik kepada kader NA. Melakukan pendidikan politik maka akan meningkatkan partisipasi politik dan memperluas jangkauan pendidikan politik.

(2) Kondisi Politik Nasional

Ada kekhawatiran yang dirasakan KHH dan JRA terhadap realita penyimpangan politik. Kondisi politik nasional juga menjadi faktor signifikan yang membuat NA merasa perlu memberikan pendidikan politik kepada para kadernya. Mereka merasa perlu memberikan pencerahan tentang

politik agar para kadernya tidak apatis dalam menyikapi kondisi politik; marak praktik korupsi, *money politics*, penyuapan, dll. SPP adalah ruang yang disediakan NA untuk kadernya mendapatkan wawasan politik.

(3) Partisipasi Politik Kader

Ada kesenjangan politik di antara kader NA. Ada sebagian anggota kader NA yang kesadaran politiknya rendah, namun ada pula sebagian anggota NA lainnya yang memiliki kesadaran politik yang tinggi dengan bergabung menjadi anggota partai politik.

Melalui SPP, NA ingin para kadernya yang wawasan politiknya rendah menjadi melek politik. Sedangkan bagi kader NA yang telah berpartisipasi aktif di partai politik, tujuannya agar mereka memiliki pemahaman atas partisipasi politik yang dilakukannya.

Proses Pelaksanaan Sekolah Politik Perempuan

Proses penyelenggaraan pendidikan menurut pengalamannya Lapera (dalam Mahardika, 2001: 106-107) meliputi pengantar, topik, tujuan, metode, media, waktu,

narasumber, dan proses kegiatan. Sebagai sebuah pendidikan politik perempuan, SPP memuat pokok bahasan tentang politik dan perempuan dalam politik yaitu kepemimpinan perempuan dan *gender budgeting*, sedangkan materi lainnya masih bersifat pengetahuan umum tentang politik.

SPP memiliki tujuan khusus di luar tujuan utama yang dimunculkan. Peneliti menemukan adanya tujuan khusus yang ingin dicapai melalui pelaksanaan SPP yang diselenggarakan berkeliling ke 5 kota dan melibatkan pemerintah daerah. Yaitu sebagai upaya membangun jejaring dengan lingkungan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan kue-kue kekuasaan. Setelah memiliki komunikasi yang baik, PDNA tidak sungkan lagi dalam meminta bantuan bupati/wakil bupati serta mendapatkan tawaran kerjasama dalam beberapa program.

Metode yang digunakan yaitu diskusi, yang dibagi dalam 2 segmen, yaitu dengan akademisi dan praktisi. Media yang digunakan yaitu proyektor, Al-Quran digital untuk

melaksanakan kajian ayat politik. SPP direncanakan 12 kali pertemuan salam setahun. Dilaksanakan berkeliling di rumah dinas bupati di 5 kota DIY pada hari ahad minggu ke-3. Namun pelaksanaannya tidak selalu sesuai rencana karena menyesuaikan kesiapan tuan rumah dan peserta.

Proses pelaksanaan SPP terdiri dari sambutan dari penyelenggara SPP, sambutan dari bupati/wakil bupati, *review* materi sebelumnya, tadarus ayat politik, materi pertama dari akademisi lalu diskusi, kemudian materi kedua dari praktisi lalu diskusi, *ishoma*, diakhiri penutup.

SPP sebagai pendidikan politik perempuan, memang dikhususkan bagi kader NA yang semuanya perempuan. Namun pada kenyatannya ada kader dari ortom lain yang tertarik untuk bergabung pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM.

Dalam setiap pertemuan, NA menghadirkan 2 narasumber, yaitu dari kalangan akademisi dan dari kalangan praktisi. Hal tersebut dilakukan agar para peserta memahami politik secara utuh, antara

ilmu dengan pelaksanaannya seperti apa.

Manfaat yang dirasakan peserta dalam mengikuti SPP yaitu menambah semangat untuk belajar politik semakin bertambah, serta bermanfaat dalam menganalisa kegiatan politik seperti pilkada. Tentang apa, kenapa, dan bagaimana fenomena politik itu bisa terjadi.

Namun ada juga kader yang sebenarnya kurang berminat mengikuti SPP. Ada beberapa kader NA yang mengikuti SPP hanya sebagai kewajiban anggota Nasyah yang baik, dengan mengikuti program yang ada. Ada pula yang tidak tertarik pada politik karena menurutnya politik itu penuh dengan kelicikan. Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa masalah besar yang dihadapi dalam tantangan pendidikan politik adalah rendahnya minat perempuan untuk tertarik dan terjun ke politik.

Kendala-Kendala Dalam Sekolah Politik Perempuan

Sekolah Politik Perempuan adalah salah satu dari sekian banyak program kerja di departemen sosial pendidikan PWNA DIY 2012-2016.

Pelaksanaan SPP berjalan di tengah periode karena begantian dengan program kerja lainnya seperti *parenting*. Pilkada Bantul dan Sleman membuat SPP urung terlaksana di wilayah tersebut karena masalah ijin. Selain itu juga penyelenggara terlibat dalam Muktamar NA yang dilaksanakan di UMY pada 2016. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi kendala utama sehingga pelaksanaan SPP mundur dan pada akhirnya dihentikan karena mendekati akhir periode PWNA DIY 2012-2016.

Sedangkan bagi peserta, kendala jarak dan waktu menjadi penghambat bagi mereka dalam mengikuti setiap pelaksanaan SPP. Informasi waktu pelaksanaan yang tidak pasti membuat peserta kesulitan menyesuaikan jadwal dengan kegiatan lain. Pelaksanaan SPP yang diadakan di lintas kota membuat para kader berpikir ulang karena membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang lebih dalam mengikutinya.

SIMPULAN

Sekolah Politik Perempuan adalah bentuk partisipasi politik Nasyyatul Aisyiyah. NA mendorong para kadernya untuk terlibat di politik. Melalui SPP, NA ingin menjaring kader-kadernya yang memiliki minat dan kapasitas untuk terjun ke politik.

NA memandang perlu bagi keterlibatan perempuan di ranah kebijakan. Hal ini tidak terlepas dari keikutsertaan 2 anggota departemen sosial pendidikan PWNA DIY dalam Kelas Parlemen. Realita politik nasional yang penuh praktik penyimpangan dirasa perlu segera disikapi dengan langkah-langkah strategis, salah satunya melalui pendidikan politik. Partisipasi politik kader NA dalam beberapa partai politik juga menjadi pertimbangan, karena hal itu menjadi modal NA dalam memperluas jaringannya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti bantuan ekonomi dari jejaring dan kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Respon kader NA terbagi menjadi 2, yaitu ada yang merespon positif dan ada pula yang merespon negatif. Para kader yang merespon positif adalah mereka yang memiliki minat ke politik, telah berpartisipasi aktif dalam politik seperti; menjadi panwaslu, menjadi kader partai politik. Sedangkan para kader yang merespon negatif yaitu mereka yang masih menganggap politik itu kotor dan licik, ada pula yang memiliki pengalaman buruk ketika berpolitik di organisasi.

Kendala utama dalam SPP adalah banyaknya kegiatan lain baik dari internal; program kerja lain, maupun eksternal; pilkada, muktamar NA membuat SPP tidak sesuai rencana dan akhirnya dihentikan karena mendekati akhir periode PWNA DIY 2012-2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. (2016). Pendidikan Politik Perempuan. *Jurnal Visipena*. 7(1): 1-24. Diakses pada 22 Februari 2017, pukul 20.33 WIB.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

- Fakih, Mansour. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Mansur. (2008). Ormas Keagamaan Dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Madani. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 4(1): 5-22. Diakses pada 24 Oktober 2016, pukul 15.45 WIB.
- Kartono, Kartini. (2009). PENDIDIKAN POLITIK: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung: CV Mandar Maju.
- Mahardika, Timur. (2001). PENDIDIKAN POLITIK: Pemberdayaan Desa; Sebuah Panduan. Yogyakarta: LAPERA.
- Sastriyani, Siti Hariti. (2009). *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1992). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soeharto, Achmad. (2011). Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Jurnal Muwazah*. 3(1): 325-333. Diakses pada 22 Februari 2017, pukul 20.02 WIB.
- Soetjipto, Ani Widyani. (2011). POLITIK HARAPAN: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi. Tangerang. Marjin Kiri.
- Susanti, Neila. (2008). Optimalisasi Peran Politik Organisasi Perempuan Islam. *Jurnal Konstitusi*. 2(1): 57-70. Diakses pada 12 Oktober 2016, pukul 14.10 WIB.
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Susiana, Sali. (2014). Penurunan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2014. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*. 6(10): 10. Diakses pada 18 Juli 2017, pukul 19.40 WIB.